

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA
LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN ILMU AL QUR'AN
DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Oleh:
Anis Khoirun Nisa
E20183137

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA
LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN ILMU AL QUR'AN
DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Oleh :
Anis Khoirun Nisa
E20183137

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA
LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN ILMU AL QUR'AN
DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing :



Dr. Nur Ika Maulivah, SE., M.Ak
NIP. 198803012018012001

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA
LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN ILMU AL QUR'AN
DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

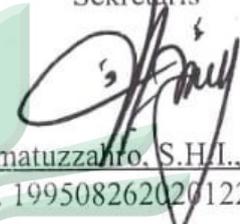
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris


Ana Pratiwi, M.S.A
NIP. 198809232019032003


Fatimatu Zahro, S.H.I., M.SEI.
NIP. 199508262020122007

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. ()

2. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. ()

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”

(QS. Asy-Syura: 38)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38. Lihat juga: Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat rahmat serta hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dari awal sampai akhir. Dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua Orang Tua, terlebih khususnya Abah Achmad Wahyudi dan Ibu Ngariyah yang senantiasa memberikan dukungan penuh berupa doa dan semangat setiap hari maupun dukungan materil untuk menyelesaikan skripsi ini, adik kandung, seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi semangat hingga hari ini.
2. Keluarga besar Bani Suja'i yang selalu mendoakan dan memberi dukungan selalu menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember, yang telah membimbing serta memberikan ilmunya dengan ketulusan dan kesabaran, semoga mendatangkan manfaat dan keberkahan.
4. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2018 kelas Akuntansi Syariah 3 yang saat ini berjuang bersama dan saling mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, karena telah memberikan kesempatan menuntut ilmu dan pengalaman bagi penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LEMBAGA PONDOK PESANTREN ILMU AL QUR’AN DI KABUPATEN JEMBER”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dengan gelar sarjana Akuntansi (S. Akun) dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di Yaumul akhir.

Hasil penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

4. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Kordinator Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember serta dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan, waktu, tenaga, pikiran, serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
7. Segenap Informan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis sangat berharap atas kritik dan saran yang membangun dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Anis Khoirun Nisa, Nur Ika Mauliyah, 2025: Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an Di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Kata kunci: good governance, transparansi, akuntabilitas, pondok pesantren, tata kelola lembaga, pendidikan Islam

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan moral bangsa. Meski memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan dan nilai-nilai keagamaan, banyak pesantren masih menjalankan sistem pengelolaan yang tradisional dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur'an Kabupaten Jember, dengan fokus pada lima prinsip utama yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana prinsip transparansi pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an 2) Bagaimana prinsip akuntabilitas pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an 3) Bagaimana prinsip tanggung jawab pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an 4) Bagaimana prinsip kemandirian pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an 5) Bagaimana prinsip kesetaraan pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an

Tujuan peneliti ini adalah menganalisis Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap pengurus pesantren, santri serta wali santri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prinsip transparansi telah diterapkan dalam penyampaian informasi kepada wali santri dan masyarakat, namun pengambilan kebijakan masih terpusat pada figur pengasuh pondok, sehingga transparansi dinilai cukup baik; (2) Akuntabilitas terlihat dari adanya struktur organisasi yang jelas dan pelaporan kegiatan secara berkala, meskipun masih dilakukan secara sederhana tanpa sistem akuntansi formal; (3) Tanggung jawab diimplementasikan dengan optimal melalui program beasiswa bagi santri yatim dan kurang mampu, yang menunjukkan komitmen sosial tinggi dari pengurus; (4) Prinsip kemandirian terefleksi dalam pembentukan sikap mandiri santri dan ketergantungan minimal terhadap pihak eksternal, meskipun masih membutuhkan dukungan pengembangan ekonomi pesantren; (5) Kesetaraan diterapkan melalui pemberian fasilitas yang adil bagi seluruh santri, tanpa membedakan latar belakang ekonomi atau gender, serta adanya perlakuan setara bagi seluruh pihak di lingkungan pesantren.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	iv
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II Kajian Kepustakaan	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	22
1. <i>Agensi (Agency)</i>	22
2. <i>Stakeholder</i>	24
3. <i>Good Governance</i>	25
4. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	27

5. Tujuan <i>Good Governance</i>	31
6. Pengertian Pondok Pesantren	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subyek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	38
F. Keabsahan Data	39
G. Tahap-tahap Penelitian	40
BAB IV Penyajian dan Analisis Data	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
1. Sejarah Berdirinya Pondok Ilmu Al-Quran Pesantren Internasional ..	43
2. Visi dan Misi	43
3. Struktural Kepengurusan Pondok Ilmu Al-Quran Pesantren Internasional	44
4. Geografis	45
B. Penyajian Data dan Analisis	45
1. Implementasi Prinsip Transparansi (<i>Transparancy</i>) Pada Pondok Ilmu Al-Quran Jember	45
5. Implementasi Prinsip Akuntabilitas (<i>Accountability</i>) Pada Pondok Ilmu Al-Quran Jember	47

2. Implementasi Prinsip Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>) Pada Pondok Ilmu Al-Quran Jember	5
3. Implementasi Prinsip Kemandirian (<i>Independensi</i>) Pada Pondok Ilmu Al-Quran Jember	51
4. Implementasi Prinsip Kesetaraan (<i>Fairness</i>) Pada Pondok Ilmu Al-Quran Jember	52
C. Pembahasan Temuan	54
1. Implementasi Prinsip Transparansi (<i>Transparancy</i>) Pada Pondok Ilmu Al-Quran Jember	54
2. Implementasi Prinsip Akuntabilitas (<i>Accountability</i>) Pada Pondok Ilmu Al-Quran Jember	53
3. Implementasi Prinsip Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>) Pada Pondok Ilmu Al-Quran Jember	58
4. Implementasi Prinsip Kemandirian (<i>Independensi</i>) Pada Pondok Ilmu Al-Quran Jember	59
5. Implementasi Prinsip Kesetaraan (<i>Fairness</i>) Pada Pondok Ilmu Al-Quran Jember	61
BAB V Penutup	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

Lampiran-lampiran

- 1) Matriks
- 2) Surat Pernyataan Keaslian
- 3) Pedoman Wawancara/ Angket penelitian
- 4) Surat Izin Penelitian
- 5) Surat Selesai Penelitian
- 6) Jurnal Kegiatan Penelitian
- 7) Dokumentasi
- 8) Struktur Kepengurusan
- 9) Surat Keterangan Screening turnitin 25%
- 10) Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi
- 11) Biodata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	28
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan moral bangsa, serta memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan dan nilai-nilai keagamaan. Dimana pesantren tidak hanya mendidik aspek keilmuan agama, tetapi juga membentuk karakter dan moral generasi muda melalui pola pendidikan berbasis asrama. Pesantren-pesantren ini telah lama berperan penting dalam mencetak tokoh-tokoh agama dan sosial di tengah masyarakat.

Banyaknya jumlah pesantren di Indonesia, serta besarnya jumlah santri pada tiap pesantren menjadikan lembaga ini layak diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral. Selama ini pondok pesantren dianggap eksklusif dan tertutup dari manajemen modern. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas pengelolaan lembaga, muncul tantangan serius terkait tata kelola lembaga yang modern dan akuntabel. Karena pada umumnya kepemimpinan serta tata kelola di pesantren masih banyak yang sifatnya alami dan tradisional seperti halnya yang ada di Jember.

Seperti halnya dari realitas di lapangan, banyak pesantren masih dikelola secara tradisional dengan sistem manajemen informal yang berbasis kekeluargaan. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakteraturan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, serta

minimnya partisipasi pemangku kepentingan seperti wali santri dan masyarakat sekitar. Seperti yang dijelaskan oleh Ramadani & Putri,² pesantren menghadapi kendala dalam sistem pelaporan keuangan yang sebagian besar masih bersifat lisan dan belum terdokumentasi dengan baik, sehingga prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan. Suatu lembaga tentunya harus memiliki sebuah pengelolaan yang baik agar setiap perencanaan yang telah ditentukan dapat terealisasi dengan maksimal. Salah satu pendekatan tata kelolaan yang relevan untuk diterapkan adalah biasa dikenal dengan istilah *good governance*.³

Good Governance merupakan aturan *governance* dianggap penting pelaksanaannya karena prinsip yang terkandung pada konsep ini membawa sebuah lembaga meraih sinergi yang tentunya akan bermanfaat. *Good governance* pada Pondok Pesantren tentunya memiliki peran yang sangat penting mengingat bahwasannya pesantren termasuk lembaga nirlaba yang diselenggarakan oleh masyarakat sehingga untuk menjamin tercapainya kinerja secara efektif dan efisien. Selain itu, dalam hal pembiayaan keuangan merupakan komponen kunci dalam pengelolaan pendidikan dan merupakan sumber dukungan bagi keberhasilan pembangunan pondok pesantren. Namun, kurangnya keinginan dan kesadaran pondok pesantren menjadi tantangan terbesar dalam mengimplementasikan prinsip *good governance* tersebut. Oleh karena itu, maka diperlukannya implementasi prinsip-prinsip *good*

² Ramadani, L., & Putri, M. (2022). *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan pada Pondok Pesantren*. Jurnal Akuntabilitas Syariah, 5-6

³ Yuniep Mujanti Suaidah, Ella Rohmatillah, "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance pada Lembaga Pendidikan Pesantren (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jombang)", Juni 2022

governance yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kesetaraan (*fairness*).⁴

Masalah-masalah tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan, guna meningkatkan kualitas tata kelola pesantren. Penerapan prinsip ini telah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi dan efektivitas lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Sejalan dengan penelitian Arifin & Maulida, prinsip *fairness* atau kesetaraan sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial santri.⁵

Pondok pesantren Ilmu Al Qur'an Pesantren Internasional salah satu lembaga yang terletak di Jl. Bandeng No,1, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dimana pondok tersebut bukan seperti pondok pada umumnya yang memiliki sistem tata pengelolaan dan sistem pembelajaran yang tidak terjadwal. Dimana pondok pesantren tersebut menerima santri baru dari kalangan menengah kebawah hingga keatas. Selain itu juga pada pondok tersebut menerima santri bukan dari kalangan anak-anak saja melainkan dari kalangan dewasa hingga santri yang sudah berkeluarga.

⁴ Audhie Ardah Anggita Rahmah et al., "Implementasi *Good governance (Gcg)* Dalam Perspektif Islam Pada Lembaga Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pesantren Mambaus Sholihin Suci, Manyar, Gresik)," *Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2023): 137–57, <https://doi.org/10.22236/jei.v14i2.9345>.

⁵ Arifin, M., & Maulida, N. (2022). *Fairness in Islamic Education: Mengelola Kesetaraan di Pesantren*. Jurnal Pendidikan Islam

Pondok pesantren Ilmu Al Qur'an ini merupakan lembaga yang menarik dikaji karena memiliki sistem penerimaan santri dari berbagai latar belakang sosial, usia hingga yang sudah berkeluarga. Namun dalam praktiknya, pondok ini masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan yang sentralistik, serta kurangnya sumber daya manusia yang memahami sistem pembukuan formal. Masalah ini menjadi hambatan besar dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel.

Penerapan *good governance* menjadi penting karena pondok pesantren ilmu al qur'an tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga sosial nirlaba yang menerima dana dari masyarakat, pemerintah, maupun donatur. Oleh karena itu, pesantren ilmu Al qur'an ini harus dikelola secara akuntabel dan transparan agar dapat mempertahankan kepercayaan publik dan mewujudkan efektivitas pendidikan. Dalam melaksanakan program di pondok pesantren, perlu adanya manajemen sumber dana dan sistem tata kelolaan yang jelas sebagai upaya agar kebijakan yang dikeluarkan kementerian agama dapat diturunkan menjadi suatu program yang baik. Pengelolaan dana pendidikan dalam pesantren meliputi dua hal yakni bagaimana memperoleh sumber dana dan bagaimana mengalokasikan dana dalam lingkungan pondok pesantren.

Dalam suatu lembaga termasuk pesantren, pengelolaan keuangan sering juga menimbulkan permasalahan yang serius bila pengelolaan kurang baik. Dalam pandangan islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi,

benar, tertib dan terartur. Seperti halnya pada pondok pesantren Ilmu Al Qur'an ini mengalami terhambatnya tata pengelolahan pesantren yaitu kurangnya sumber daya manusia tentang pemahaman dengan adanya pembukuan penerimaan dan pengalokasian keuangan pesantren, serta tradisi pondok yang masih menjadi budaya untuk menyimpan dan mengelola dana secara transparan, seperti halnya lembaga tersebut tidak banyak mempersolakan laporan keuangannya.

Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur'an di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember merupakan contoh konkret lembaga pendidikan Islam yang menghadapi tantangan tersebut. Meski memiliki visi inklusif dalam menerima santri dari berbagai latar belakang sosial dan usia, dalam praktiknya pesantren ini masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan, proses pengambilan keputusan yang sentralistik, serta minimnya sistem pembukuan yang formal. Jika tidak dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, maka risiko menurunnya kepercayaan publik sangat tinggi.

Termasuk pesantren ini masih menghadapi kesulitan keuangan, baik yang berkaitan dengan penganggaran, akuntansi, pengaturan administrasi, kebutuhan alokasi dan proses pengembangan. Karena pengaturan manajemen keuangan yang tidak tertata rapi, sehingga banyak proses pendidikan pesantren yang lamban dan menjadikan laporan keuangan atau pengelolaan dana kurang dalam pelaporan penyajian dengan prinsip good governance.

Pelaporan pengalokasian dana harus dilakukan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang dirumuskan oleh KNKG yakni transparansi,

akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan. Dimana daya hidupnya berasal dari dana yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan itu sendiri, pihak Pemerintah, Masyarakat, serta Wali santri. Kucuran dana yang masuk ke pesantren ini biasanya jumlahnya tidak sedikit, maka jika pondok pesantren tidak melakukan pengelolaan yang baik, akuntabilitas pondok pesantren tersebut akan dipertanyakan. Sedangkan pada tambahnya tahun kapasitas santri sudah mulai menambah sehingga diperlukannya proses pembangunan baru, seperti halnya laporan keuangan haruslah tertata sesuai dengan akuntansi pesantren.

Selain itu, teori agensi dan teori stakeholder relevan digunakan sebagai landasan untuk memahami relasi antara pengurus pesantren (agen) dengan wali santri dan masyarakat (prinsipal), serta pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Penelitian Yuliana & Firmansyah menguatkan bahwa hubungan kepercayaan antara agen dan prinsipal sangat rentan jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas yang kuat, yang pada akhirnya akan merusak kredibilitas lembaga pendidikan Islam.⁶ Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan pesantren, diperlukan implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang sistematis dan berbasis pada partisipasi serta akuntabilitas. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diimplementasikan di Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an, serta untuk

⁶ Yuliana, I., & Firmansyah, H. (2021). *Implementasi Teori Agensi dalam Lembaga Pendidikan Islam*. Jurnal Ekonomi Islam

memberikan rekomendasi penguatan sistem tata kelola lembaga pesantren. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian yang berjudul “**Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Quran di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember**”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian yang akan dibahas selama penelitian. Fokus penelitian disajikan dalam bentuk pertanyaan dengan susunan yang ringkas, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kaimat tanya.⁷

1. Bagaimana implementasi prinsip transparansi (*transparancy*) pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an?
2. Bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas (*accountability*) pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an?
3. Bagaimana implementasi prinsip tanggung jawab (*responsibility*) pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an?
4. Bagaimana implementasi prinsip kemandirian (*independency*) pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an?
5. Bagaimana implementasi prinsip kesetaraan (*fairness*) pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an?

⁷ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmas Siddiq Jember, 2021), 45.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah panduan yang menggambarkan arah yang ingin dicapai dalam proses penelitian. Tujuan ini harus selaras dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selain itu, tujuan penelitian memiliki hubungan erat dengan rumusan masalah yang dirancang untuk mencapai hasil dari penelitian tersebut.⁸

1. Untuk menganalisa prinsip transparansi (*transparancy*) pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an
2. Untuk menganalisa prinsip akuntabilitas (*accountability*) pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an
3. Untuk menganalisa prinsip tanggung jawab (*responsibility*) pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an
4. Untuk menganalisa prinsip kemandirian (*independency*) pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an
5. Untuk menganalisa prinsip kesetaraan (*fairness*) pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang prinsip-prinsip *good governance* bagi peneliti dan pembaca, juga sebagai bahan perbandingan serta referensi bagi peneliti

⁸ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmas Siddiq Jember, 2021), 45.

lain dalam melakukan penelitian terhadap objek atau masalah yang sama pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan, serta menambah wawasan pengetahuan tentang prinsip-prinsip *good governance*

b) Bagi Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an.

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam hal penerapan prinsip *good governance* dan dapat menjadi sebuah acuan untuk meningkatkan efektifitas sistem tata pengelolaan pesantren. Sehingga Pondok pesantren dapat melakukan tata pengeloaan dengan menggunakan prinsip *good governance* dengan baik.

E. Definisi Istilah

1. *Good Governance*

Good Governance merupakan aturan dasar yang harus dimiliki oleh setiap Lembaga. Istilah lain yaitu sebagai suatu paket kebijakan yang memuat uraian hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, pekerja dan *stakeholder* lain, baik secara internal maupun eksternal, sebagai suatu bentuk tanggung jawab.⁹ *Good Governance* di pesantren merujuk pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam peneglolaan organisasi pesantren, baik dari segi keuangan, sumber

⁹ Muhammad Aqil Al Hawari, "Analisis Implementasi *Good governance* Menuju Pesantren Mandiri (studi kasus pesantren alam indonesia di kabupaten barru, sulawesi selatan)", hal-10, 2023

daya, maupun pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan kesetaraan diterapkan secara relevan pada lembaga pendidikan islam seperti pondok pesantren guna untuk menciptakan sistem pengelolaan yang partisipatif, profesional dan bertanggungjawab.

2. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan Lembaga Pendidikan berbasis Islami yang tertua dalam Sejarah Indonesia. Pada zaman walisongo, pondok pesantren juga sangat berperan dalam penyebaran agama islam di pulau jawa. Demikian pula, pada saat zaman penjajahan Belanda, pondok pesantren merupakan salah satu basis kekuatan dalam melawan penjajah Belanda dengan dukungan sepenuhnya yang diberikan oleh pesantren.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan urutan penulisan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Topik penelitian dijelaskan secara singkat untuk menggambarkan langkah-langkah penelitian dari awal hingga akhir.

Bab I, Pendahuluan. Memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

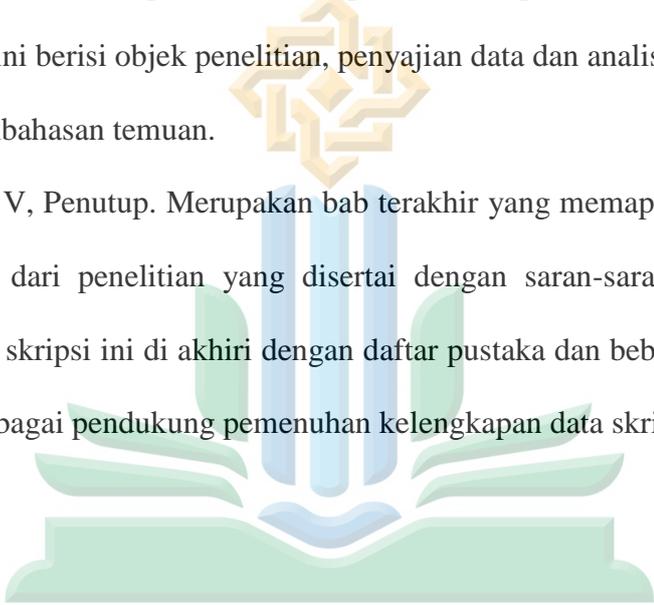
Bab II, Kajian kepustakaan. Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan mengenai penelitian sejenis yang diteliti sebelumnya dan dilanjutkan dengan kajian teori.

¹⁰ Renny Oktafia and Abdul Basith, "Implementasi Good Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing", *Jurnal Ekonomi Islam*, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

Bab III, Metode penelitian. Dalam hal ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Penyajian dan analisis. Merupakan penyajian dan analisa data yang didapatkan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian secara empiris. Dalam bab ini berisi objek penelitian, penyajian data dan analisis serta diakhiri dengan pembahasan temuan.

Bab V, Penutup. Merupakan bab terakhir yang memaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian yang disertai dengan saran-saran dari peneliti. Selanjutnya skripsi ini di akhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelengkapan data skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Setelah mempelajari berbagai sumber pustaka untuk mengevaluasi keaslian penelitian ini, penting untuk menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa dan fokus yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Patma Dwi Jayanti dengan judul “Implementasi Prinsip Good Governance di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang implementasi prinsip good governance di Kantor Camat Tambang diketahui faktor yang menjadi penghambat implementasi pemberian pelayanan di kantor tersebut tidak terselesaikan dengan baik sesuai dengan jumlah pelayanan dari masyarakat. Dikarenakan kurangnya respon dari pegawai camat memberikan pelayanan yang tidak efisien serta kurangnya informasi untuk prosedur pelayanan yang disajikan dikantor camat.

Perbedaan antara peneliti Patma Dwi Jayanti ini implementasi good governance fokus pada permintaan pelayanan kantor camat dan pada peneliti ini implementasi prinsip good governance pada Lembaga pondok

pesantren ilmu al qur'an. Persamaan pada peneliti keduanya sama-sama mendeskripsikan prinsip good governance.¹¹

2. Danang Febriyanto dengan judul “Analisis Penerapan Good governance (GCG) Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012).”

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penerapan good governance terhadap kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan lima variabel penelitian.

Persamaan antara penelitian Danang Febriyanto dan penelitian ini adalah keduanya menganalisis penerapan good governance. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian; penelitian Danang Febriyanto berfokus pada analisis penerapan good governance terhadap kinerja perusahaan, sementara penelitian ini menjelaskan implementasi Pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an.¹²

3. Ivan Yusuf Faisal dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kontrak dan Pelayanan Pasca Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Pada PT. TASPEN (PERSERO) Yogyakarta.”

¹¹ Patma Dwi Jayanti, “Implementasi Prinsip Good Governance di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar”, Pekan Baru, 2024

¹² Mita Puji Astuti and Tri Gunarsih, “Pengaruh Good governance Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Pada Perusahaan Public Tahun 2009-2017”, Seminar Nasional UNRIYO 8, no. Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Dalam Publikasi Ilmiah di Era Revolusi Industri 4.0 (2019): 181–92

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang secara rinci tentang pengaruh diberlakukannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi pada PT. Taspen (Persero).

Persamaan antara penelitian ini dan karya peneliti adalah keduanya membahas good governance. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian Ivan Yusuf Faisal yang berorientasi pada perjanjian kontrak di PT. Taspen (Persero) setelah diberlakukannya Peraturan Presiden tersebut, sementara penelitian peneliti lebih berfokus pada implementasi pada Lembaga pondok pesantren ilmu al qur'an.¹³

4. Sukmaningrum dan Alamsyah dengan judul “*Good Governance* dalam Lembaga Pendidikan Islam: Kajian Stakeholder”.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi stakeholder seperti wali santri, masyarakat dan guru sangat penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di pesantren. keterlibatan mereka menciptakan pengawasan bersama yang meningkatkan kualitas tata kelolaan pesantren.

Persamaan dari peneliti Sukmaningrum dan Alamsyah dengan peneliti ini yakni sama menghasilkan keterbatasan transparansi, sedangkan perbedaan peneliti Sukmaning dan Alamsyah dengan peneliti ini fokus pada beasiswa yatim piatu.¹⁴

¹³ Turan Presiden, Nomor Tahun, and Moh Ikfar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap hak Dan Kewajiban Kontraktor Dalam Kontrak Pemborong Menurut Pera-*” 12, no. 2 (2024)

¹⁴ Heni Sukmaningrum & Muhammad Alamsyah. *Good Governance dalam Lembaga Pendidikan Islam: Kajian Stakeholder*, 2023

5. Siti Fauziah Nur Ariani tahun dengan judul “Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal”.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang memahami alasan mengapa pemerintah perlu memiliki pelayanan public yang baik untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Persamaan antara peneliti Siti Fauziah Nur Ariani dan peneliti ini sama-sama menggunakan prinsip good governance dengan beberapa aspek yang sama. Perbedaan peneliti Siti Fauziah Nur Ariani ini mengimplementasi good governance pada pelayanan public yang dilakukan di pemerintahan lokal seperti ditingkat Kelurahan Kaligangsa dan pada peniliti ini mengimplementasikan prinsip good governance pada Lembaga pondok pesantren ilmu al qur'an.¹⁵

6. Ramadani dan Putri dengan berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan pada Pondok Pesantren”.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pesantren dalam studi ini belum memiliki sistem keuangan yang terdokumentasi dengan baik. Laporan masih bersifat lisan dan tidak disampaikan secara terbuka kepada wai santri. Akibatnya, prinsip akuntabilitas dan transparansi belum maksimal diterapkan.

¹⁵ Siti Fauziah Nur Ariani, “*Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Tingkat Lokal*”, Semarang, 2022

Persamaan dari peneliti Ramadani dan Putri dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas akuntabilitas yang belum optimal, sedangkan perbedaan terletak pada penguatan karakter melalui kemandirian santri.¹⁶

7. Arifin dan Maulida dengan judul “Fairness in Islamic Education: Mengelola Kesetaraan di Pesantren”.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pesantren yang dikaji memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh santri, tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonomi. Kesetaraan ini menjadi dasar terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis.

Persamaan antara peneliti Arifin dan Maulida dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas kesetaraan dalam perlakuan santri tanpa diskriminasi ekonomi, sedangkan pada perbedaan penelitian dengan peneliti ini pada konsep kekeluargaan dalam kesetaraan dalam menegakkan keadilan.¹⁷

8. Siti Fauziah Nur Aini dengan judul “Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal”.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang memahami alasan mengapa pemerintah perlu memiliki pelayanan publik yang baik untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Persamaan antara peneliti Siti Fauziah Nur Aini dengan peneliti ini sama-sama menggunakan prinsip good governance dengan beberapa aspek.

¹⁶ Lusi Ramadani & Melati Putri, *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan pada Pondok Pesantren*, 2022

¹⁷ Mohamad Arifin & N. Maulida, *Fairness in Islamic Education: Mengelola Kesetaraan di Pesantren*, 2022

Perbedaan peneliti Siti Fauziah Nur Ariani ini mengimplementasi good governance pada pelayanan publik yang dilakukan di pemerintahan lokal seperti ditingkat Kelurahan Kaligangsa dan pada peneliti ini mengimplementasikan prinsip good governance pada Lembaga pondok pesantren ilmu al qur'an.¹⁸

9. Hana Septi Kuncaraningsih dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta”.

Hasil peneliti ini menjelaskan tentang adanya pengaruh *good corporate governance* terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Sleman sebesar 16,3% sedangkan 83,7% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode kuantitatif dan fokus pada kepuasan muzakki. Persamaan penelitian dan peneliti ini yaitu sama-sama menggunakan prinsip good governance.¹⁹

10. Intan Yuliana dan H. Firmansyah dengan judul “Implementasi Teori Agensi dalam Lembaga Pendidikan Islam”.

Hasil peneliti ini menjelaskan bahwa studi ini menekankan pentingnya hubungan kepercayaan antara prinsipal (wai santri) dan agen (pengurus pondok). Kegagalan dalam menjaga transparansi dan

¹⁸ Siti Fauziah Nur Ariani, “Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal”, Semarang, 2022

¹⁹ Hana Septi Kuncaraningsih, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta”, 2021

akuntabilitas akan melemahkan kepercayaan stakeholder terhadap pengurus.

Persamaan antara peneliti Intan Yuliana dan H. Firmansyah dengan peneliti ini menggunakan teori yang sama, sedangkan perbedaan terletak pada objek yang dituju dan pendekatan pada peneliti terdahulu cenderung pada konseptual teoritis dan refleksi, pada peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.²⁰

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Patma Dwi Jayanti (2024)	Implementasi Prinsip Good Governance di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar	Terkait pembahasan yang memiliki kesamaan tentang mengimplementasikan good governance	Perbedaan antara peneliti Patma Dwi Jayanti ini implementasi good governance fokus pada permintaan pelayanan kantor camat dan pada peneliti ini implementasi prinsip good governance pada Lembaga pondok pesantren ilmu al qur'an
2	Danang Febriyanto (2024)	Analisis Penerapan Good governance (GCG) Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan)	Sama-sama menganalisis penerapan good governance	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian Danang Febriyanto berfokus pada analisis penerapan good governance terhadap kinerja perusahaan,

²⁰ Intan Yuliana & H. Firmansyah. *Implementasi Teori Agensi dalam Lembaga Pendidikan Islam*, 2021

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012)		sementara penelitian ini menjelaskan implementasi Pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an.
3	Yusuf Faisal (2024)	Tinjauan Yuridis Perjanjian Kontrak dan Pelayanan Pasca Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Pada PT. TASPEN (PERSERO) Yogyakarta	Sama-sama menganalisis terkait penerapan good governance	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian Ivan Yusuf Faisal yang berorientasi pada perjanjian kontrak di PT. Taspen (Persero) setelah diberlakukannya Peraturan Presiden tersebut, sementara penelitian peneliti lebih berfokus pada implementasi pada Lembaga pondok pesantren ilmu al qur'an
4	Heni Sukmaningrum dan M. Alamsyah (2023)	Good Governance dalam Lembaga Pendidikan Islam: Kajian Stakeholder	Sama-sama mengalami keterbatasan transparansi	Perbedaan terletak pada peneliti ini fokus pada beasiswa yatim-piatu
5	Siti Fauziah Nur Aini (2022)	Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal	Sama-sama menggunakan prinsip good governance dengan beberapa aspek	Perbedaan peneliti Siti Fauziah Nur Aini ini implementasi good governance pada pelayanan publik yang dilakukan di pemerintahan lokal ditingkat kelurahan kaligangsa sedangkat pada

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
				peneliti ini implementasi prinsip 6good governance pada lembaga pondok pesantren ilmu a quran
6	Lusi Ramadani dan Melati Putri (2022)	Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan pada Pondok Pesantren	Sama-sama membahas akuntabilitas yang belum optimal	Perbedaan pada peneliti Lusi Ramadani dan Melati Putri dengan peneliti ini terletak pada penguatan karakter melalui kemandirian santri
7	Mohammad Arifin dan N. Maulida (2022)	Fairness in Islamic Education: Mengelola Kesetaraan di Pesantren	Sama-sama menghasilkan kesetaraan yang terjaga	Perbedaan pada peneliti mohammad Arifin dan N. Maulida dengan peneliti ini terletak pada konsep kekeluargaan dalam kesetaraan dalam menegakkan keadilan
8	Nur Ariani (2022)	Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal”	Sama-sama menggunakan prinsip good governance dengan beberapa aspek yang sama	Perbedaan peneliti Siti Fauziah Nur Ariani ini mengimplementasi good governance pada pelayanan public yang dilakukan di pemerintahan loka seperti ditingkat Kelurahan Kaligangsa dan pada peniliti ini mengimplementasikan prinsip good governance pada Lembaga pondok pesantren ilmu al qur'an.

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
9	Hana Septi Kuncaraningsih (2021)	Pengaruh Good governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta”	Sama-sama membahas terkait penerapan good governance	Perbedaan peneliti Hana Septi Kuncaraningsih dengan peneliti ini terletak pada penggunaan metode kualitatif dan fokus pada Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance pada Lembaga pondok pesantren ilmu al qur’an
10.	Intan Yuli dan H. Firmansyah (2021)	Implementasi Teori Agensi dalam Lembaga Pendidikan Islam	Sama-sama menggunakan teori yang serupa dan fokus pada hubungan prinsipal-agen	Perbedaan peneliti Intan Yuli dan H. Firmansyah terletak pada objek yang dikaji dan metode pendekatan yang berbeda

Sumber : Peneliti

Skripsi peneliti mengkaji sistem tata kelolaan dengan implementasi prinsip *good governance* pada lembaga pendidikan pondok ilmu al qur’an.

Berdasarkan hal demikian, penelitian ini begitu penting untuk dilakukan sebab guna untuk menjadikan pembandingan dalam perubahan atau pencarian model sistem tata kelolaan. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelolaan pesantren guna mendukung keberlanjutan operasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

B. Kajian teori

1. Agensi (Agency)

Menurut Jensen & Meckling dalam karya mereka yang berjudul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, Michael C. Jensen dan William H. Meckling menjelaskan bahwa teori agensi berpusat pada hubungan antara prinsipal (pemilik atau pihak yang memberi amanat) dan agen (pihak yang menjalankan amanat). Mereka menarik bahwa dalam hubungan ini, terdapat biaya agensi atau "biaya agensi" yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Misalnya, agen mungkin memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingannya sendiri daripada kepentingan utama, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan dan kerugian. Untuk mengurangi konflik ini, Jensen dan Meckling memberikan izin penggunaan mekanisme pengawasan, kontrak, atau insentif agar agen berperilaku sesuai dengan keinginan prinsipal. Teori mereka telah menjadi dasar untuk banyak kajian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi.²¹

Menurut Eisenhardt dalam artikelnya yang berjudul *Agency Theory: An Assessment and Review*, Kathleen M. Eisenhardt memberikan penilaian komprehensif terhadap teori agensi, tekanan bagaimana teori ini digunakan untuk memahami mekanisme kontrol dan insentif dalam hubungan prinsipal-agen. Eisenhardt menjelaskan bahwa teori agensi cocok diterapkan dalam situasi di mana terdapat perbedaan tujuan antara

²¹ Jensen, MC, & Meckling, WH. "Teori Perusahaan: Perilaku Manajerial, Biaya Agensi dan Struktur Kepemilikan". *Jurnal Ekonomi Keuangan*, 3(4), (1976).

prinsipal dan agen, serta ketika pemantauan langsung terhadap agen sulit dilakukan. Ia juga mengidentifikasi dua bentuk kontrol utama untuk mengatasi masalah agensi:

- 1) Kontrol berbasis perilaku, yaitu melalui pengawasan langsung dan aturan-aturan
- 2) Kontrol berbasis hasil, yang didasarkan pada pemberian insentif berbasis kinerja. Eisenhardt menyoroti bahwa pilihan mekanisme kontrol akan bergantung pada informasi yang tersedia dan tingkat pemesanan dalam hubungan prinsipal-agen.²²

Menurut Ross dalam tulisannya *The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem*, Stephen A. Ross menguraikan model teori agensi dengan memperkenalkan konsep-konsep tentang asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Ross menjelaskan bahwa sering kali agen memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal, yang dapat menyebabkan kesulitan prinsipal untuk menyatukan atau memastikan bahwa agen bertindak sesuai keinginan mereka. Untuk mengurangi risiko ini, Ross menyarankan agar struktur insentif yang baik dapat digunakan agar agen tetap bertindak sejalan dengan prinsipal kepentingan.²³

²² Eisenhardt, KM. Teori Agensi: Penilaian dan Tinjauan. *Academy of Management Review*, 14(1), (1989). 57–74.

²³ Ross, SA. Teori Ekonomi Agensi: Masalah Prinsipal. *The American Economic Review*, 63(2), (1973). 134–139.

2. *Stakeholder*

Menurut Freeman dalam bukunya menyatakan teori Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki hubungan erat dan langsung mempengaruhi kegiatan perusahaan. Terdapat dua model dalam teori pemangku kepentingan, yaitu kebijakan dan perencanaan bisnis, serta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam manajemen pemangku kepentingan. Fokus utama kepentingan adalah nilai dan peningkatan operasional perusahaan, serta bagaimana perusahaan memenuhi kepentingan mereka.²⁴

Duran dan Davor menyatakan bahwa pemangku kepentingan perusahaan meliputi pemegang saham, karyawan, pemasok, bank, pemerintah dan komunitas, semuanya memiliki peran penting dalam suatu organisasi atau perusahaan.²⁵ Clarkson membagi pemangku kepentingan perusahaan menjadi dua kategori berdasarkan jenis dan karakteristiknya: pemangku kepentingan primer dan sekunder. Pemangku kepentingan primer adalah individu atau kelompok yang keberadaannya esensial bagi kelangsungan hidup perusahaan, seperti pemegang saham, karyawan, investor, pemasok, dan konsumen.

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa organisasi harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat atau terpengaruh

²⁴ Freeman, RE. *Manajemen Strategis: Pendekatan Pemangku Kepentingan* Boston: Pitman. (1984). 78

²⁵ Duran, Manuel Balza, dan Davor Radojicic. "Corporate Social Responsibility and Nongovernmental Organizations." (2004). 90

oleh aktivitasnya.²⁶ Dalam konteks pesantren, *stakeholder* meliputi santri, wali santri, masyarakat sekitar, donatur, dan pemerintah. Prinsip *good governance* sangat sejalan dengan teori ini karena mengedepankan keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas terhadap semua *stakeholder*. Maka, tata kelolaan pesantren harus menciptakan mekanisme komunikasi dan melibatkan semua pihak yang relevan.

3. *Good Governance*

Berdasarkan berbagai pendapat dari pakar teori *good governance*, definisinya adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain *good governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.²⁷

Istilah *good governance* mulai dikenal luas di Indonesia pada era 1990-an, terutama melalui interaksi dengan Negara-negara donor yang menyoroti perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. *Good governance* dianggap sebagai salah satu kriteria bagi negara-negara yang sukses dalam pembangunan, bahkan menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan optimal. Konsep ini kemudian dipahami sebagai standar bagi organisasi publik, khususnya dalam konteks pemerintahan.

²⁶ Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.

²⁷ Indah Permata Sari, "Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan," *Juripol* 4, no. 1 (2021): 90–97, <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987>.

Menurut Moenek dkk dalam bukunya menyatakan, *good governance* dapat diartikan secara sederhana sebagai pengelolaan yang baik, yang dimaksud dengan “baik” disini adalah pengelolaan yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip dasar *good governance*. Beberapa kalangan mengartikan *good governance* sebagai prinsip konkret dari demokrasi, yang ditunjang oleh budaya masyarakat sipil untuk menjamin kelanggengan demokrasi.

Selain itu, *good governance* berarti pemerintahan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, agar sumber daya negara benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat serta negara. Secara umum *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan prinsip dasar *good governance*. Berdasarkan definisi Bank Dunia dan UNDP *good governance* adalah manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, serta disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik yang mendukung.²⁸

Good governance pada pondok pesantren ialah merujuk pada sistem tata kelolaan yang baik dalam menjalankan seluruh aktivitas pendidikan, pembinaan dan manajemen dilingkungan pesantren. hal ini mencakup mekanisme, proses, dan struktur yang memastikan bahwa pesantren dikelola dengan cara sistem *good governance*.

²⁸ Moenek, Reydonnyzar, dan Dadang Suwanda. "Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah." (2019).

Dalam konteks pesantren sebagai lembaga pendidikan islam tradisional yang unik, *good governance* berarti menggabungkan nilai-nilai kepesantrenan yang sudah mengakar dengan manajemen modern untuk menciptakan sistem pengelolaan yang baik namun tetap sesuai dengan identitas dan tujuan pesantren.

4. Prinsip prinsip *Good Governance*

Mengenai prinsip-prinsip *good governance*, sebelumnya memahami terlebih dahulu definisi Tata Kelola Lembaga yang baik (*good governance*) itu sendiri. Untuk mewujudkan implementasi *good governance* yang efektif, diperlukan prinsip-prinsip dasar yang sering dikenal dengan istilah TARIF.²⁹ Berdasarkan pedoman umum *good governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada Tahun 2006, prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

a) **Transparansi (*Transparency*)**

Prinsip ini mengharuskan lembaga untuk menyediakan informasi yang relevan dan signifikan yang mudah diakses oleh semua pihak, baik internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaannya, transparansi mengharuskan lembaga untuk menyajikan informasi yang jelas, akurat, memadai, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

²⁹ Mutmainah, "ANALISIS GOOD GOVERNANCE TERHADAP A . PENDAHULUAN Memaksimalkan Nilai Perusahaan Adalah Tujuan Utama Dibentuknya Sebuah Perusahaan . Harga Yang Bersedia Dibayar Oleh Calon Investor Seandainya Suatu Perusahaan Akan Dijual Diartikan Sebagai Nilai," *Eksis X*, no. 2 (2015): 181.195.

Namun transparansi yang digunakan pada peneliti ini yaitu keterbukaan dengan menyangkut informasi dan kebijakan. Hal yang ingin dikaji adalah bagaimana pesantren dapat menjalankan prinsip keterbukaan melalui indikator informasi dan indikator kebijakan, sehingga penelitian dapat diketahui penerapan prinsip keterbukaan pada pondok pesantren Ilmu Al Qur'an ini berjalan dengan baik, cukup baik atau sangat baik.

Tujuan prinsip transparansi ini terhadap lembaga pondok pesantren Ilmu Al Qur'an yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan, program dan keuangan pesantren
- 2) Pengelolaan informasi yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan seperti santri, wali santri dan masyarakat
- 3) Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan

b) **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas berarti sistem lembaga yang harus dapat dipertanggung jawabkan kinerjanya secara jelas dan adil. Setiap tugas dan tanggung jawab di setiap lembaga harus disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua indikator, yakni struktur pesantren dan sistem pesantren.

Seperti yang diterapkannya proses akuntabilitas maka pesantren yang dikelola dapat berjalan secara benar, terukur dan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholder* maupun kepentingan pondok pesantren sendiri. Tujuan prinsip akuntabilitas ini terhadap lembaga pondok pesantren Ilmu Al Qur'an yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan pesantren
- 2) Mekanisme pelaporan keuangan yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Sistem pertanggungjawaban kinerja pengurus dan pengajar kepada seluruh pemangku kepentingan

c) **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Prinsip tanggungjawab yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua indikator, yaitu indikator tanggungjawan pesantren terhadap masyarakat dan lingkungan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan prinsip tanggungjawab ini terhadap pondok pesantren Ilmu Al Qur'an yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan pada regulasi pemerintah dan peraturan internal pesantren
- 2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial pesantren terhadap masyarakat sekitar

- 3) Komitmen pada nilai-nilai islam dan pendidikan dalam setiap aktivitas

d) **Kemandirian (*Independency*)**

Kemandirian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator pihak eksternal dan indikator pihak internal pesantren.

Tujuan prinsip kemandirian ini terhadap pondok pesantren Ilmu Al Qur'an yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan pesantren yang bebas dari tekanan dan intervensi pihak lain
- 2) Kemandirian ekonomi melalui unit usaha pesantren dan pendanaan berkelanjutan
- 3) Pengambilan keputusan yang objektif berdasarkan kepentingan pesantren

e) **Kesetaraan (*Fairness*)**

Lembaga harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan saran atau masukan. Sehingga peneliti ini menggunakan indikator *stakeholder*, guna untuk mengukur sejauh mana penerapan tersebut di pondok pesantren Ilmu Al Qur'an.

Tujuan prinsip kesetaraan ini pada pondok pesantren Ilmu AL Qur'an yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlakuan adil terhadap seluruh santri dan tenaga pengajar

- 2) Kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dan fasilitas pesantren
- 3) Sistem *reward* dan *punishment* yang adil dan proposional

5. Tujuan *Good Governance*

Selain itu, dengan adanya tujuan prinsip *good governance* pada pondok pesantren tersebut membuat sistem tata kelolaan menjadi terstruktur dengan baik dan efisien. Selain itu juga terdapat manfaat dalam penerapan prinsip *good governance* sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kepercayaan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat, wali santri dan donatur
- 2) Keberlanjutan institusi untuk menjamin keberlangsungan pesantren melalui sistem yang terstruktur
- 3) Peningkatan kualitas untuk mendorong perbaikan mutu pendidikan dan layanan pesantren
- 4) Adaptasi modern untuk membantu pesantren beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya
- 5) Pengelolaan konflik untuk menyediakan mekanisme resolusi konflik yang jelas dan adil

Good governance di pondok pesantren bukanlah konsep yang kaku. Melainkan prinsip yang dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing pesantren, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai esensial pesantren sebagai lembaga pendidikan islam.

6. Pengertian Pondok Pesantren

Kata pesantren berasal dari kata "santri" dengan imbuhan awalan "pe" dan akhiran "an", yang menunjukkan makna sebagai tempat untuk santri. Pondok pesantren merupakan tempat untuk mengajar anak-anak agar bisa mencapai pendidikan, dimana pondok pesantren juga salah satu lembaga pendidikan non formal yang fokus pada ilmu dan pendidikan agama islam. Pesantren juga sering dikenal dengan istilah pondok, yang mengacu pada kamar, gubug, atau bangunan yang menonjolkan kesederhanaan. Secara umum, pesantren bersifat mandiri, artinya tidak bergantung pada pemerintah atau kekuasaan tertentu.³⁰ Dengan sifat mandiri ini, pesantren dapat mempertahankan kemurnian perannya sebagai lembaga pendidikan Islam.

Secara terminologi, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan islam yang memiliki 5(lima) elemen dasar:

1. Ketua Yayasan

2. Santri

3. Masjid

4. Pondok/Asrama

5. Pengajian Kitab

Pengertian pondok pesantren secara terminologis bervariasi menurut beberapa ahli, di antaranya:

³⁰ Riskal Fitri and Syarifuddin Ondeng, "Pesantren Di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter," *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 42–54, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>.

- a) Menurut Hambal S (2014), pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Menurut Arifin (2014), pondok pesantren adalah lembaga sosial keagamaan yang umumnya berbentuk yayasan.
- c) Menurut Abd. Halim Soebahar (2013), pesantren adalah asrama pendidikan Islam tradisional yang dikelola oleh seorang kiai atau ustadz, di mana santri tinggal dan belajar di bawah bimbingan mereka.
- d) Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama berbasis Islam yang berfungsi sebagai satuan pendidikan dan/atau wadah penyelenggaraan pendidikan.
- e) Menurut Yakin (2014), pesantren merupakan sistem pendidikan tertua di Indonesia, lebih tua dibandingkan lembaga pendidikan lainnya, dan telah dianggap sebagai produk budaya yang religius.

Dari definisi-definisi tersebut, terlihat jelas betapa pentingnya peran pondok pesantren dalam sistem pendidikan. Pesantren tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai tempat untuk membentuk moral santri agar dapat mengamalkan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari.

Macam macam pondok pesantren

Sebelum membahas kurikulum, penting untuk menjelaskan terlebih dahulu tipe-tipe pondok pesantren. pondok pesantren memiliki fungsi utama sebagai:

- 1) Lembaga pendidikan dan pengajaran agama islam
- 2) Lembaga dakwah dan penyebaran ilmu agama
- 3) Lembaga pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sosial-ekonomi
- 4) Lembaga pelestarian tradisi dan nilai-nilai keislaman

Menurut Mastuhu, pondok pesantren secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu pondok pesantren Salafi dan pondok pesantren Khalaf (modern). Adapun kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren tersebut adalah sebagai berikut:³¹

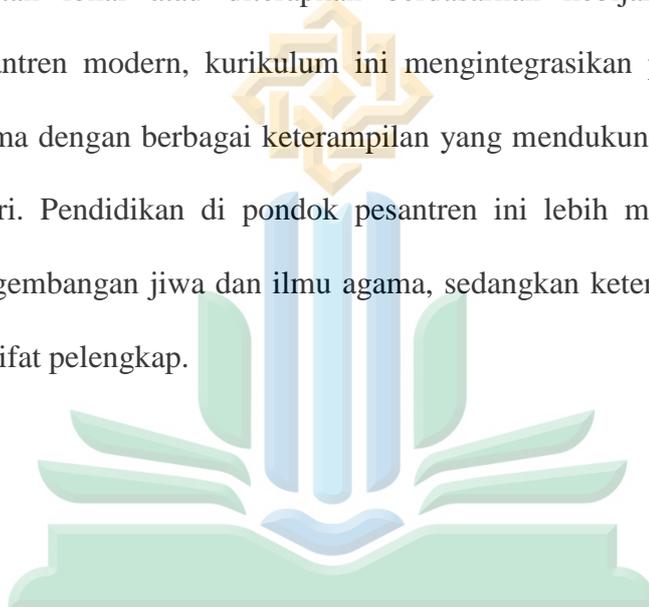
a) Pondok Pesantren Salafi

Kurikulum di pesantren *salaf*, yang merupakan lembaga pendidikan non-formal, hanya mencakup pengajaran kitab-kitab klasik yang meliputi ilmu tauhid, tafsir, fiqh, usul fiqh, tasawuf, bahasa Arab (nahwu, sharaf, balaghoh, dan tajwid), mantik, serta akhlak. Pelaksanaan kurikulum ini dibagi berdasarkan tingkat kesulitan atau kompleksitas ilmu yang dibahas dalam kitab, yakni tingkat awal, menengah, dan lanjut. Metode pembelajaran yang diterapkan di pesantren salaf umumnya menggunakan metode *sorogan* dan *bandongan*, yang lebih fokus pada pengajaran ilmu agama tanpa disertai keterampilan tambahan.

³¹ Sangkot Nasution, "Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan," *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam VIII*, no. 2 (2019): 126–27.

b) Pondok Pesantren Khalaf (Modern)

Kurikulum di pondok pesantren khalaf atau modern mulai diadaptasi dengan kurikulum pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dalam sistem pendidikan formal (madrasah). Sedangkan kurikulum khusus pesantren biasanya dialokasikan sebagai muatan lokal atau diterapkan berdasarkan kebijakan sendiri. Di pesantren modern, kurikulum ini mengintegrasikan pengajaran ilmu agama dengan berbagai keterampilan yang mendukung perkembangan santri. Pendidikan di pondok pesantren ini lebih menekankan pada pengembangan jiwa dan ilmu agama, sedangkan keterampilan lainnya bersifat pelengkap.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan sangat rinci. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada deskripsi mendalam dan cenderung melibatkan analisis. Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis karena dapat mengungkapkan data secara mendalam, serta penelitian secara langsung dilakukan di lapangan pada informan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Ilmu Al Qur'an Pesantren Internasional yang terletak di Jl. Bandeng No.1, Kec. Kaliwates, Kab. Jember. Pesantren tersebut berdiri sejak tanggal 03 November 2017 dan dibawah pengawasan Moh. Idham David. Dimana pondok tersebut tidak seperti pondok pesantren pada umumnya, karena pondok tersebut menerima santri dari kalangan anak-anak, remaja hingga santri yang sudah berkeluarga(bermukim). Selain itu, pondok tersebut memprioritaskan santri dari golongan yatim piatu.

Pondok ini bisa terbilang dari tipologi pesantren salafi ataupun modern, karena pondok ini tidak memiliki sistem pembelajaran yang khusus. Namun, juga ada kegiatan pengajian yang biasa dilaksanakan rutin pada malam senin dan malam jumat serta pengajian ini bersifat umum yang diisi oleh Gus

David selaku pengawas yayasan. Kegiatan tersebut dilakukan di area lingkup pondok yakni musholla.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian menggunakan teknik *purposive respondent* atau biasa disebut dengan teknik pengambilan sumber data pada pihak yang telah ditentukan yakni:

- 1) Ketua yayasan : Indra Gunawan
- 2) Pengurus pondok : Agung
- 3) Santri : Amel
- 4) Wali santri : Sanipa

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan langsung, yang juga dapat diartikan sebagai pengamatan yang terstruktur terhadap fenomena yang sedang diselidiki. Untuk penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah *non-participant observation*, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam situasi yang diamati, melainkan hanya berfungsi sebagai pengamat.

2. Wawancara

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan, baik dengan maupun tanpa pedoman wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara *semi-struktural*, yang dimulai dengan serangkaian pertanyaan yang sudah disusun, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman untuk mengklarifikasi dan mengecek lebih lanjut jawaban yang diberikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati berbagai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *agenda*, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperkuat dan membandingkan data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Menurut Sugiyono, terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut.³²

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Merupakan tahap pertama dalam analisis data. Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan anega macam cara

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).

(observasi, wawancara, inti dari dokumen) dan yang biasanya “diperoses” kira-kira sebelum siap digunakan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini akan ditampilkan dalam bentuk narasi teks. Pada tahap ini, data akan disajikan melalui kutipan wawancara, foto (dokumentasi), dan tabel. Hal ini bertujuan agar bagian-bagian penting dari penelitian dapat terlihat dengan lebih jelas, mempermudah pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi, serta memudahkan dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah proses mendapatkan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Proses ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil yang telah ditemukan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dimaksud adalah untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang berhubungan dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan hasil penelitian, memperjelas dan mengungkapkan data menggunakan fakta yang aktual di lapangan. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas secara internal akan dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati sesuai dengan apa yang

terjadi di lapangan. Pada penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yang mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis sumber yang berbeda, guna mendapatkan data yang lebih akurat dan menyeluruh.³³ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi sumber: peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain
2. Triangulasi teknik: jenis triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

1. Tahap pra lapangan

Tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Tahapan tersebut juga dilalui oleh peneliti sendiri, adapun enam tahapan tersebut yaitu:

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matriks penelitian, selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik (DPA).

³³ Darsono wisadi, "Metode Penelitian Dan Penulisan Skripsi" (Malang: UMM Press, 2005).

b. Memilih objek penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Dan lapangan yang dipilih oleh peneliti adalah Pondok Ilmu Al Qur'an Pesantren Internasional yang terletak di Jl. Bandeng No.1 Kaliwates – Jember.

c. Mengajukan judul kepada ketua kaprodi yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian.

d. Mengurus perizinan

Sebelum memulai penelitian, peneliti harus mendapatkan izin terlebih dahulu dengan cara mengajukan surat permohonan bimbingan skripsi ke kampus. Setelah itu, surat tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing dan peneliti mengajukan permohonan penelitian kepada pihak kampus melalui surat izin penelitian, yang akan diserahkan kepada Pondok Ilmu Al Qur'an Pesantren Ilmu Al Qur'an. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah diperbolehkan melakukan penelitian atau tidak.

e. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.

f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing

g. Mempersiapkan penelitian lapangan

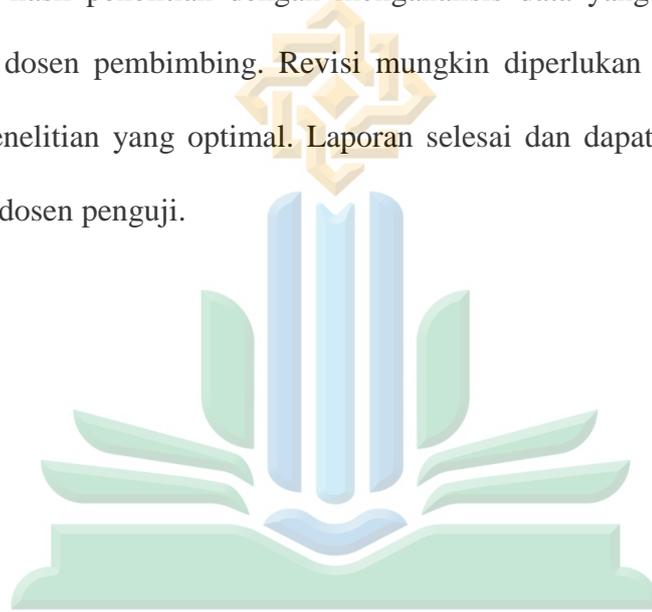
2. Tahap pelaksanaan lapangan

Pada tahap ini, peneliti akan pergi ke lokasi penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan

dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan berkaitan dengan Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Lembaga Pendidikan Pondok Ilmu Al Qur'an Pesantren Internasional.

3. Tahap penyelesaian

Ini adalah tahap terakhir dari peneliti. Pada tahap ini, peneliti membuat laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Revisi mungkin diperlukan untuk mencapai hasil penelitian yang optimal. Laporan selesai dan dapat dipresentasikan kepada dosen penguji.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya Pondok Ilmu Al Qur'an Pesantren Internasional

Awal berdirinya Pondok Ilmu Al Qur'an Pesantren Internasional yaitu berdiri pada tanggal 03 November 2017 dibawa pengawasan Gus David. Istilah dari Pondok Ilmu Al Qur'an Pesantren Internasional tersebut diambil dari dua makna yakni:

Kata dari Pondok Ilmu Al Qur'an yang berarti pondok tersebut terdapat sistem pembelajaran yang dimana dengan aktivitas santri dengan mengaji. Dan dimana juga pondok ini tidak sama dengan pondok lainnya yang terdapat pembelajaran seperti diniyah (pembelajaran bahasa arab, nahwu, shorof dan lainnya). Kegiatan mengaji dilakukan rutin pada minggu malam senin dan kamis malam jumat yang disi langsung oleh Gus David. Dalam kegiatan mengaji tersbut juga tidak lupa dengan mengikuti dasar *Ahlusunnah Wal Jamaah* (Aswaja) dan tidak hanya mengaji al quran saja namun mengkaji nilai pedoman pedoman al quran. Serta, kata dari Pesantren Internasional yang berarti dalam kegiatan mengaji tidak hanya diikuti oleh santri dan pengurus saja, melainkan terbuka untuk umum.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi lembaga pendidikan islam terpadu yang unggul dalam pembedakan karakter islami.

b. Misi

- a. Membangun lembaga yang baik
- b. Membangun katakter islami yang kokoh
- c. Menyelenggarakan pendidikan islam yang komprehensif

c. Struktural Kepengurusan Pondok Ilmu Al Qur'an Pesantren Internasional

- 
- 1) Pembina : Bibit Rahayu
 - 2) Pengawas Yayasan : Moh. Idham David
 - 3) Ketua Yayasan : Indra Gunawan
 - 4) Sekretaris : Imam Fatoni
 - 5) Bendahara : Teguh Budianto
 - 6) Bidang Divisi kegiatan
 - a) Bidang Pendidikan : Elva Maria
 - b) Bidang Humas, Komunikasi dan Pembangunan: Farit Palupi Ningtyas
 - c) Bidang Logistik dan Perlengkapan: Andrik Heriyanto

Dalam struktur kepengurusan tersebut disusun langsung oleh Gus David selaku pengawas pondok. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pondok Ilmu Al Qur'an tersebut didirikan oleh Aba dari Gus David, dimana Gus David sendiri memberi amanah kepada bapak Indra Gunawan selaku ketua yayasan pondok ilmu al qur'an tersebut untuk mengelolah lebih lanjut pondok dengan pengurus lainnya.

d. Letak Geografis

Yayasan pondok Ilmu Al Qur'an Pesantren Internasional terletak di Jl. Bandeng No.1, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Prinsip Transparansi (*Transparancy*) pada Pondok Pesantren Ilmu Al Quran Jember

Pada penerapan ini peneliti menyajikan data berdasarkan prinsip transparansi dengan mengkaji beberapa narasumber yang terlibat didalam pondok pesantren yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu:

a. Penerapan transparansi pada kebijakan dan pengambilan keputusan

Prinsip transparansi sendiri mengharuskan lembaga untuk menyediakan informasi yang relevan dan signifikan dapat mudah diakses oleh semua pihak, baik internal maupun eksternal. Sehingga pada peneliti ini transparansi yang digunakan yakni menyangkut sistem keterbukaan, dengan terkait informasi dan kebijakan. Pada penerapan transparasi ini terkait kebijakan dan pengambilan keputusan, bahwasannya pada proses pengambilan keputusan ini masih terpusat pada figur kiyai atau pengasuh. Dimana hal ini mencerminkan prinsip transparansi terkait responden dan proses pengambilan keputusan masih terbatas, dalam kategori cukup baik. Seperti dari peneliti telah menghasilkan wawancara dengan bapak Indra:

“Pada pondok ini dengan sistem transparansi memang secara terbuka, namun hanya ada beberapa kebijakan-kebijakan pondok yang memang tidak juga sepenuhnya tahu oleh atau dipublikasikan untuk umum. Tapi dengan penyampaian seperti ini kita tidak semerta-merta menyampaikan hal tersebut, melainkan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarga pondok (dhalem).³⁴

Selain itu juga peneliti menghasilkan wawancara dengan bapak

Agung:

“Pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan pondok ini memang kita tetap melakukan dengan kebijakan pengasuh sebagai pengurus juga mengusulkan beberapa kebijakan dan kita tampung setelah itu juga kita musyawarahkan kepada pengasuh yayasan pada saat rapat rutin”.³⁵

Hasil dari wawancara tersebut prinsip transparansi ini sangat berpengaruh penting kepada pihak internal dan eksternal, terutama pada pihak pengurus dimana hal tersebut juga tidak dapat dipublikasikan secara menyeluruh terkait informasi yang masih belum disetujui. Peneliti menghasilkan bahwa prinsip transparansi dengan kategori cukup baik.

b. Penerapan transparansi terkait perspektif wali santri

Pada penerapan transparansi di pondok ilmu al qur’an ini dalam perspektif wali santri diwujudkan melalui penyampaian informasi terkait program kegiatan, keuangan dan kebijakan pesantren kepada wali santri. Dimana informasi tersebut disampaikan melalui rapat rutin, buletin dan media sosial. Seperti peneliti menghasilkan wawancara dengan ibu Sanipa:

³⁴ Wawancara, bapak Indra selaku ketua yayasan pondok ilmu al qur’an, 21 Mei 2025.

³⁵ Wawancara, bapak Agung selaku pengurus lembaga pondok ilmu al quran, 24 Mei 2025.

“Kalau terkait informasi kegiatan di pondok itu, semisal keponakan saya itu pas waktu ada kegiatan dia tidak ada jadinya saya ditelpon langsung sama ibu Elva dan saya langsung bertindak langsung untuk mencari keponakan saya dan langsung saya antar ke pondok”.³⁶

Hasil dari wawancara tersebut prinsip transparansi pada perspektif wali santri yakni pada penyampaian informasi mengenai kegiatan pesantren. peneliti menghasilkan bahwa prinsip transparansi pada perspektif dengan kategori baik.

2. Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada Pondok Pesantren Ilmu Al Quran Jember

Data dalam penelitian ini disajikan berdasarkan prinsip akuntabilitas pondok yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu:

a. Penerapan akuntabilitas dalam konteks pesantren

Pada prinsip akuntabilitas sendiri ialah akuntabilitas dalam pondok pesantren tidak hanya dipahami sebagai pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai amanah spiritual. Pengurus pesantren menyeimbangkan hubungan dengan Tuhan dan manusia sebagai pedoman dalam melestarikan budaya tanggungjawab yang mencerminkan sifat seorang beriman dan bertaqwa, sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari.³⁷

³⁶ Wawancara, ibu Sanipa selaku wali santri pondok ilmu al quran, 24 Mei 2025.

³⁷ Windasari, I. (2024). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam*. *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam konteks pesantren yang mencakup pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, sumber daya, dan kegiatan pendidikan kepada berbagai pihak, termasuk santri, orang tua, donatur dan masyarakat. Sehingga penerapan pada pondok ilmu al qur'an sendiri masih terbilang kurang baik. Seperti halnya peneliti yang dilakukan wawancara dengan bapak Indra:

“Dalam sistem struktural pondok ini memang bukan dari kami yang menentukan pihak-pihak terkait kepengurusan pondok. Melainkan pemilihan kepengurusan ini secara menunjuk langsung istilah lain dari keluarga pondok sendiri yang memilih siapa saja yang menjabat jadi kepengurusan pondok ini”.³⁸

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Selain pada prinsip akuntabilitas ini terkait struktural pondok. Dimana dalam struktur pondok ini pihak keluarga pondok (*dhalem*) langsung memilih siapa saja yang terstruktur dalam kepengurusan ini.

Selain itu juga menghasilkan wawancara lanjutan dari bapak Indra:

“Kalau sudah dipilih secara independen ini bagaimana lagi mbak, ya kami selaku yang sudah terpilih menjadi struktural mau tidak mau harus bertanggungjawab penuh terhadap pondok ini. Dan juga kami sangat menerima hal tersebut karena kami sudah diberi kepercayaan tanggungjawab untuk mengolah pondok ini dengan baik”.³⁹

Sehingga pengurus pondok yang telah tercantum pada struktural pondok ilmu al qur'an ini memiliki tanggungjawab penuh terkait pengelolaan pondok pesantren.

³⁸ Wawancara. Bapak Indra selaku ketua yayasan pondok ilmu al quran, 21 Mei 2025.

³⁹ Wawancara. Bapak Indra selaku ketua yayasan pondok ilmu al quran, 21 Mei 2025.

b. Penerapan akuntabilitas finansial dan administratif

Akuntabilitas diimplementasikan dengan melalui pelaporan kegiatan dan keuangan secara periodik kepada pengurus dan pihak terkait. Setiap program kegiatan memiliki laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh penanggung jawab kegiatan dan diaudit secara internal. Seperti halnya peneliti wawancara dengan bapak Agung:

“Laporan keuangan pondok ini yang bertanggungjawab yaitu bu Elva. Dimana bu Elva juga selaku istri dari Gus David pengawas pondok. Kebetulan juga dalam hal pelaporan keuangan ini masih terbilang cukup sederhana, dimana juga kami dalam pencatatan laporan keuangan tidak sama dengan pondok pesantren lainnya.”⁴⁰

Lanjutan dari wawancara peneliti dengan bapak Agung:

“Dan sekilas saya tau untuk pelaporan keuangan ini sudah cukup tanggungjawab, dikarenakan setiap ada pemasukan dan pengeluaran pasti dicatat, jadi nya dalam hal pembiayaan seperti yang dibutuhkan anak-anak santri, mengapa hanya pemasukan dan pengeluaran saja yang dicatat karena kurangnya sumber daya manusia akan hal pemahan dalam pencatatan laporan keuangan dan minimnya fasilitas yang kurang memadai serta kurangnya pelatihan”⁴¹

Berdasarkan wawancara diatas, dimana pada pondok pesantren ini masih mengandalkan sistem pencatatan secara tradisional, sehingga pesantren ini memiliki keterbatasan sumber daya manusia dibidang akuntansi dan administrasi. Peneliti menghasilkan bahwa prinsip akuntabilitas ini telah diterapkan dengan kategori cukup baik.

⁴⁰ Wawancara, bapak Agung selaku pengurus lembaga pondok ilmu al quran, 24 Mei 2025.

⁴¹ Wawancara bapak Agung selaku pengurus lembaga pondok ilmu al quran, 24 Mei 2025.

3. Implementasi Prinsip Tanggungjawab (*Responsibility*) pada Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an Jember

Pada prinsip tanggungjawab ini yakni dimana lembaga harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, memastikan bahwa semua aktivitas dan kebijakan yang dijalankan sesuai hukum, peraturan dan standar yang ditetapkan. Selain itu juga bertanggungjawab kepada masyarakat dan lingkungan, termasuk menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan serta menjalankan program-program yang mendukung keinginan sosial dan lingkungan. Terlebih khususnya pada penerapan tanggungjawab pada pendidikan melalui program beasiswa Pada Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an menetapkan tanggungjawab yang jelas bagi setiap pengurus, termasuk dalam hal pemberian beasiswa pada santri yang telah masuk pada klasifikasi meliputi santri yang kurang mampu dalam hal ekonomi dan santri yang tidak memiliki orang tua (yatim piatu). Pada penerapan tanggungjawab ini sudah berjalan dengan baik. Seperti yang peneli hasil dari wawancara dengan ibu Sanipa:

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak pondok (pengurus) yang telah memberi informasi terkait beasiswa untuk santri yatim piatu untuk keponakan saya. Saya tidak tau lagi harus bagaimana semisal saya tidak bisa menyekolahkan keponakan saya, dimana saya sendiri juga kurangnya dari faktor ekonomi”⁴²

Dari hasil wawancara tersebut bahwasannya penerapan tanggungjawab pada pendidikan melalui program beasiswa sudah berjalan dengan baik.

⁴² Wawancara, ibu Sanipa selaku wali santri pondok ilmu al quran, 24 Mei 2025.

Sehingga peneliti menghasilkan bahwa prinsip tanggungjawab dengan kategori sangat baik

4. Implementasi Prinsip Kemandirian (*Indepedency*) pada Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an Jember

Data dalam penelitian ini disajikan berdasarkan prinsip kemandirian dengan pondok yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu:

- a. Penerapan manajemen pondok pesantren dalam membentuk kemandirian santri

Pondok pesantren ilmu al qur'an ini mengimplementasikan penerapan dengan membentuk kemandirian santri melalui fokus pada pembentukan sikap mandiri santri. Dimana pada pembentukan ini melalui program seperti keagamaan (membaca Al Qur'an, shalat tahajud) dan kegiatan umum (kerja bakti dan kegiatan sosial dilingkup pesantren) dirancang untuk mendorong santri agar mengambil inisiatif dan tanggungjawab atas tugas mereka.⁴³

- b. Peran pesantren dalam menciptakan kemandirian belajar santri

Pondok pesantren ini menerapkan program-program kemandirian belajar tujuan untuk menciptakan kemandirian belajar santri. Selain itu, dengan yang menekankan pada nilai-nilai seperti kejujuran, tanggungjawab, dan kemandirian. Melalui pendekatan ini, santri diajarkan untuk mengembangkan sikap mandiri dalam kehidupan

⁴³ Nursinta, N. (2024). *Implementasi Manajemen Pondok Pesantren dalam Pembentukan Sikap Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Ja'far Kabupaten Bantaeng*. UIN Alauddin Makassar.

sehari-hari, termasuk dalam belajar dan berinteraksi sosial. Selain itu juga mencakup kegiatan seperti mengelola waktu belajar, ibadah dan tugas-tugas harian secara mandiri.⁴⁴

Penerapan dalam pembentukan kemandirian santri mengupayakan dalam hal pembiasaan diri dalam hal keseharian seperti halnya, dalam hal pengelolaan waktu, belajar dan hal yang menyangkut tanggungjawab santri. Seperti hanya peneliti mewawancarai dengan bapak Agung:

“Pada penerapan sistem mandiri santri ini guna untuk melatih dalam hal aktivitas santri dengan manajemen waktu belajar, ibadah tugas harian dan kegiatan sosial dalam lingkungan pesantren”.⁴⁵

Selain itu, dengan adanya penerapan kemandirian santri guna untuk memperbaiki karakter santri dengan menjadi perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

5. Implementasi Prinsip Kesetaraan (*Fairness*) pada Pondok Pesantren Ilmu AL Qur'an Jember

Data dalam penelitian ini disajikan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan pondok yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu:

Pengimplementasian prinsip kesetaraan Pada pondok pesantren ilmu al quran ini terkait dengan kesetaraan gender, baik dengan santri putra ataupun santri putri. Dimana bahwa dengan penerapan prinsip kesetaraan

⁴⁴ Alfian, A., & Yaqin, M. N. (2022). *Peran Pesantren dalam Menciptakan Kemandirian Belajar Santri. Fakta: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 123–134

⁴⁵ Wawancara, bapak Agung selaku pengurus pondok, 24 Mei 2025.

ini, pondok pesantren menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengembangan santri. Selain itu, dalam hal pengelolaan pesantren juga memberikan terkait fasilitas terhadap santri dilakukan secara merata dan tidak ada istilah pilih kasih. Seluruh santri diberi hak yang sama dalam mengembangkan keterampilan seperti bertanya, menanggapi dan berdiskusi.⁴⁶ Karena prinsip kesetaraan pada pondok ini memberikan perlakuan adil terhadap seluruh pengelola pondok maupun yang terikat dengan pondok. Seperti halnya peneliti telah menghasilkan wawancara dengan bapak Indra:

“Di sistem kesetaraan ini menjadikan kekeluargaan, dalam artian pada aturan-aturan yang terkait tetap dilakukan secara independen dan menggunakan sistem kekeluargaan”.⁴⁷

Selain itu juga peneliti menghasilkan pendapat lain terkait prinsip kesetaraan dengan hasil wawancara bersama ibu Uswatun:

“Saya juga bersyukur anak saya difasilitasi dengan baik, dimana saya sendiri terbilang kurang mampu dalam hal ekonomi sehingga saya berterima kasih kepada pengurus pondok sudah memberi ruang untuk anak saya bisa melanjutkan sekolah dan bisa menimba ilmu dengan baik”.⁴⁸

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa pondok memberi fasilitas dan perlakuan adil pada santri tanpa harus melihat status sosial.

Peneliti menghasilkan bahwa prinsip kesetaraan ini dengan kategori baik.

⁴⁶ Rahmaturrehman, R. A. (2022). *Kesetaraan dalam Pendidikan sebagai Praksis Responsif Gender Era Society 5.0 di Pesantren*. *Dinamika: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(2)

⁴⁷ Wawancara, bapak Indra ketua yayasan pondok ilmu al quran, 21 Mei 2025.

⁴⁸ Wawancara. Ibu Uswatun selaku wali santri pondok ilmu al qur'an, 24 Mei 2025.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Prinsip Transparansi (*Transparancy*) pada Pondok Pesantren Ilmu Al Quran Jember

Pada prinsip transparansi ini mengharuskan untuk menyediakan informasi yang relevan dan signifikan. Dalam hal pelaksanaannya, transparansi mengharuskan lembaga menyajikan informasi yang jelas dan akurat, tepat waktu dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Hasil wawancara peneliti dengan pengurus pondok terkait prinsip transparansi sudah mulai diterapkan, terutama dalam penyampaian informasi kegiatan kepada wali santri melalui media sosial, telepon, maupun musyawarah langsung. Namun, pengambilan keputusan strategis masih bersifat sentralik oleh pihak pengasuh pondok, dengan keterbatasan akses informasi kepada pihak luar atau bahkan kepada sebagian pengurus internal.

Dari perspektif teori *agensi*, keterbatasan akses informasi antara *agen* (pengurus pesantren) dan *prinsipal* (wali santri) berpotensi menimbulkan asimetri informasi, dimana pengurus cenderung menguasai informasi lebih banyak daripada wali santri. Hal tersebut, tercermin dari sistem pengambilan keputusan yang masih bersifat sentralistik pada figur kiyai. Pada teori *stakeholder*, ketidaklibatan pihak luar dalam keputusan strategis menunjukkan masih terbatasnya partisipasi *stakeholder* dalam proses kebijakan, yang seharusnya dijamin melalui prinsip keterbukaan informasi publik. Seperti halnya peneliti menghasilkan wawancara dengan

bapak Indra dan bapak Agung, bagaimana implementasi prinsip transparansi pada lembaga pendidikan pondok pesantren ilmu al qur'an.

Hal ini berkaitan pada prinsip ini juga menerapkan sistem transparan melalui beberapa aspek yaitu:

a) Penerapan transparansi pada kebijakan dan pengambilan keputusan

Transparansi (keterbukaan) berperan penting terkait kebijakan dan pengambilan keputusan, bahwasannya pada proses pengambilan keputusan ini masih terpusat pada figur kiyai atau pengasuh. Dimana hal ini mencerminkan prinsip transparansi terkait responden dan proses pengambilan keputusan masih terbatas, dalam kategori cukup baik. Sehingga dengan minimnya keterbukaan ini dapat mempengaruhi tingkat transparansi, karena kurangnya akses informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau menurunkan tingkat kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

b) Penerapan transparansi terkait perspektif wali santri

Pada penerapan transparansi di pondok ilmu al qur'an ini dalam perspektif wali santri diwujudkan melalui penyampaian informasi terkait program kegiatan, keuangan dan kebijakan pesantren kepada wali santri. Dimana informasi tersebut disampaikan melalui rapat rutin, buletin dan media sosial. Namun, pada hal ini dapat dikatakan penyampaian informasi secara kategori baik.

2. Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada Pondok Pesantren Ilmu Al Quran Jember

Pada prinsip akuntabilitas dimana sistem lembaga yang harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara jelas dan adil. Setiap tugas dan tanggungjawab harus disesuaikan dengan visi, misi dan strategi yang ditetapkan oleh lembaga.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di pondok pesantren ilmu a qur'an sudah mulai diterapkan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sistem pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan sudah berjalan, namun masih dilakukan secara tradisional dan sederhana. Pencatatan keuangan dilakukan manual dan belum menggunakan sistem akuntansi formal. Selain itu, struktur kepengurusan disusun oleh pihak keluarga pondok (*dhaem*), bukan melalui mekanisme partisipatif.

Dalam teori *agensi*, akuntabilitas adalah jembatan yang menghubungkan *agen* (pengurus pesantren) dengan prinsipia (wai santri). Pesantren harus mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh wali santri, seperti hanya pelaporan keuangan dan penyampaian kegiatan kepada wali santri mencerminkan mekanisme kontrol yang berfungsi mengurangi resiko penyalahgunaan kewenangan. Pada teori *stakeholder*, semua pihak yang terlibat dan terdampak oleh kebijakan lembaga harus mendapat informasi dan bisa menilai akuntabilitas pengurus. Dalam hal ini, wai santri, donatur dan masyarakt sekitar berhak mengetahui

bagaimana dana dan program pesantren dijalankan. Seperti menghasilkan yaitu:

a) Penerapan akuntabilitas dalam konteks pesantren

Akuntabilitas dalam pondok pesantren tidak hanya dipahami sebagai pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai amanah spiritual. Pengurus pesantren menyeimbangkan hubungan dengan Tuhan dan manusia sebagai pedoman dalam melestarikan budaya tanggungjawab yang mencerminkan sifat seorang beriman dan bertaqwa, sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari.

b) Penerapan akuntabilitas finansial dan administratif

Akuntabilitas diimplementasikan dengan melalui pelaporan kegiatan dan keuangan secara periodik kepada pengurus dan pihak terkait. Setiap program kegiatan memiliki laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh penanggung jawab kegiatan dan diaudit secara internal. Dimana dalam pelaporan keuangan di pondok ilmu al qur'an ini masih terbilang dengan pencatatan cukup sederhana. Hal ini, karena minimnya sumber daya manusia terkait pemahaman dalam hal pelaporan keuangan dan administratif yang dilakukan secara sederhana.

3. Implementasi Prinsip Tanggungjawab (*Responsibility*) pada Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an Jember

Dalam prinsip tanggungjawab (*responsibility*) mengacu pada kewajiban suatu lembaga untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pondok. Dengan memastikan bahwa semua aktivitas dan kebijakan yang berlaku dijalankan sesuai dengan hukum, peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, lembaga juga memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan dengan menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan serta membantu menjalankan program-program yang mendukung keinginan sosial dan lingkungan melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Seperti halnya yang telah peneliti wawancara dengan ibu Sanipa (wali santri) dengan menghasilkan, penerapan prinsip tanggungjawab di pondok pesantren ilmu a qur'an terlihat jelas dalam bentuk program beasiswa untuk santri yatim piatu dan kurang mampu. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran sosial dari pengurus pondok untuk memenuhi tanggungjawab mereka terhadap masyarakat.

Pada perspektif teori *agensi*, prinsip tanggungjawab ini menuntut agar *agen* (pengurus pondok) tidak hanya mengejar kepentingannya sendiri, tetapi bertindak sebagai wakil dari *prinsipal* (wali santri, masyarakat, donatur), dengan penuh kesadaran moral dan sosial. Pada teori *stakeholder* mengajarkan bahwa tanggungjawab lembaga tidak boleh terbatas hanya pada aspek internal, tetapi juga pada kepentingan seluruh pihak yang

terlibat atau terpengaruh oleh aktivitas lembaga, termasuk masyarakat sekitar santri, wai santri dan donatur.

Pada Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an menetapkan tanggungjawab yang jelas bagi setiap pengurus, termasuk dalam hal pemberian beasiswa pada santri yang telah masuk pada klasifikasi meliputi santri yang kurang mampu dalam hal ekonomi dan santri yang tidak memiliki orang tua (yatim piatu). Pada penerapan tanggungjawab ini sudah berjalan dengan baik, secara pada santri sudah diberi fasilitas sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pondok.

4. Implementasi Prinsip Kemandirian (*Indepedency*) pada Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an Jember

Pada prinsip kemandirian ini adalah kemampuan suatu lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsi manajemennya secara mandiri tanpa adanya intervensi atau dominasi dari pihak internal maupun eksternal. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pelaksanaan dilakukan berdasarkan aturan, nilai dan kepentingan lembaga itu sendiri.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa prinsip kemandirian pada pondok pesantren ilmu a qur'an menunjukkan upaya penerapan prinsip kemandirian baik dari sisi pengelolaan internal maupun pembentukan karakter santri. Salah satu bentuk nyata adalah pelatihan tanggungjawab dan disiplin santri dalam kegiatan harian seperti ibadah, kerja bakti dan pengaturan waktu belajar.

Pada perspektif teori *agensi* pengurus pesantren sebagai *agen* diharapkan dapat mengelola lembaga secara mandiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat, tanpa intervensi berlebihan dari pihak luar, serta tetap menjaga amanah dari *prinsipal* (wai santri, masyarakat). Pada teori *stakeholder*, pondok pesantren tidak hanya bertanggung jawab pada satu pihak (seperti donatur atau pemerintah), tetapi harus dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak santri, wali santri, masyarakat dan pemerintah. Kemandirian institusi sangat penting agar keputusan yang diambil tidak berat sebelah atau bergantung pada kepentingan kelompok tertentu.

Sehingga pada prinsip ini menghasilkan beberapa aspek yaitu:

- a) Penerapan manajemen pondok pesantren dalam membentuk kemandirian santri

Pondok pesantren ilmu al qur'an ini mengimplementasikan

penerapan membentuk kemandirian santri melalui berfokus pada

pembentukan sikap kemandirian santri. Dimana pada pembentukan

sikap kemandiriannya melalui program seperti keagamaan

(membaca Al Qur'an, shalat tahajud) dan kegiatan umum (kerja

bakti dan kegiatan sosial dilingkup pesantren) dirancang untuk

mendorong santri agar mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas

tugas mereka.

- b) peran pesantren dalam menciptakan kemandirian belajar santri

Pondok pesantren ini menerapkan program-program kemandirian belajar tujuan untuk menciptakan kemandirian belajar santri. Dengan yang menekankan pada nilai-nilai seperti kejujuran, tanggungjawab, dan kemandirian. Melalui pendekatan ini, santri diajarkan untuk mengembangkan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam belajar dan berinteraksi sosial. Seperti hal lain yang mencakup kegiatan seperti mengelola waktu belajar, ibadah dan tugas-tugas harian secara mandiri.

5. Implementasi Prinsip Kesetaraan (*Fairness*) pada Pondok Pesantren Ilmu AL Qur'an Jember

Prinsip kesetaraan dapat diartikan dalam tata kelolaan operasional pesantren yang bertujuan untuk memberikan perlakuan yang setara dan proporsional kepada seluruh pihak kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Pada implementasi prinsip kesetaraan pada pondok pesantren ilmu al qur'an ini mencangkup kesetaraan gender yang memberikan kesempatan yang sama bagi santri laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengambilan keputusan. Dimana manajemen penerapan kesetaraan gender ini, selain hal dalam kesetaraan santri juga menerapkan kepada kesetaraan pengurus pondok dengan memberi pelatihan kepada pengurus pesantren guna untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan cara mengimplementasikannya dalam lingkungan pesantren.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan ibu Uswatun dimana kesetaraan pada fasilitas yang diberikan oleh pondok sudah terlaksana dengan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak pondok. Dan hasil dari wawancara peneliti dengan bapak Indra selaku ketua yayasan pondok pesantren ilmu al quran dengan menghasilkan, pada prinsip kesetaraan ini menjadikan sistem kekeluargaan terkait hal aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Pada perspektif teori *agensi*, *agen* (pengurus pondok) memiliki tanggungjawab moral dan struktural untuk memastikan semua pihak (prinsipia) dalam hal ini wai snatri dan masyarakat merasa bahwa hak mereka terpenuhi secara adil. Ketika *agen* tidak memperlakukan seluruh santri secara setara, akan muncul konflik kepentingan atau ketidakpercayaan terhadap lembaga. Pada teori *stakeholder*, lembaga harus mendengarkan, melibatkan, dan memperlakukan seluruh pihak yang terlibat secara adil, termasuk santri dari berbagai latar belakang. Kesetaraan bukan hanya tentang pembagian fasilitas, tetapi juga tentang kesempatan berpartisipasi dan penghargaan yang sama. Sehingga penerapan prinsip kesetaraan pada pondok pesantren ilmu al qur'an secara kategori baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Lembaga Pendidikan Pondok Ilmu Al Quran Pesantren Internasional Jember dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip Transparansi (*Transparancy*) pada Pondok Pesantren Ilmu Al Quran Jember menghasilkan bahwasannya terkait keterbukaan yang menyangkut informasi dan kebijakan sudah terlaksana dengan baik. Namun, tidak sepenuhnya kebijakan pengasuh tersebut di transparan.
2. Implementasi Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) pada Pondok Pesantren Ilmu Al Quran Jember, adanya sistem pelaporan dan pembagian tugas yang jelas mencerminkan upaya akuntabilitas. Namun, dalam hal laporan keuangan masih dengan cara sederhana.
3. Implementasi Prinsip Tanggungjawab (*Responsibility*) pada Pondok Pesantren Ilmu Al Quran Jember, menerapkan program beasiswa untuk santri dikategori yatim piatu dan kurang mampu. Dimana fasilitas dan biaya untuk pendidikan selanjutnya sudah terjamin dan santri juga mendapatkan uang saku harian. Sehingga penerapan ini sudah berjalan dengan sangat baik.
4. Implementasi Prinsip Kemandirian (*Indepedency*) pada Pondok Pesantren Ilmu Al Quran Jember, pada penerapan ini menghasilkan guna melatih

kefokusan santri terhadap kemandirian dilingkungan pesantren. Seperti halnya dalam beribadah, mengaji, belajar dan berinteraksi sosial.

5. Implementasi Prinsip Kesetaraan (*Fairness*) pada Pondok Pesantren Ilmu Al Quran Jember, seluruh santri diberi hak yang sama dalam mengembangkan keterampilan seperti halnya bertanya, menanggapi dan berdiskusi. Kebijakan ini juga pimpinan yayasan juga mendorong partisipasi santri dalam berbagai perlombaan, tanpa membedakan santri.

B. Saran

1. Bagi pondok pesantren keberadaan sumber daya manusia yang memadai sangat berperan penting dalam tata kelolaan pesantren. Dimana pesantren menyediakan peluang untuk sumber daya manusia dengan memahami penerapan prinsip *Good Governance* dengan baik seperti halnya sistem transparan terkait informasi dan pengambilan keputusan secara transparan dengan pihak internal maupun eksternal.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya melanjutkan penelitian dengan metode yang berbeda, guna untuk mengetahui bagaimana tata kelolaan pesantren secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hawari, Muhammad Aqil. 2023. *Analisis Implementasi Good Governance Corporate Governance Menuju Pesantren Mandiri* (studi Kasus Pesantren Alam Indonesia di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan)
- Anggita Rahmah, Audhie Ardah, Siti Masluchah Aviana Ningrum, Nur Handini, Satria Bagus Maulana, Rohmawati Kusumaningtias, and Ambar Kusumaningsih. "Implementasi Good governance (Gcg) Dalam Perspektif Islam Pada Lembaga Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pesantren Mambaus Sholihin Suci, Manyar, Gresik)." *Ekonomi Islam*
- Arifin, M., dan Maulida, N. (2022). *Fairness in Islamic Education: Mengelola Kesetaraan di Pesantren*. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Astuti, Mita Puji, and Tri Gunarsih. "Pengaruh Good governance Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Pada Perusahaan Public Tahun 2009-2017." *Seminar Nasional UNRIYO 8, Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Dalam Publikasi Ilmiah di Era Revolusi Industri 4.0* (2019).
- Darsono wisadi. "Metode Penelitian Dan Penulisan Skripsi." Malang: UMM Press, 2005.
- Dhofier, Z. (2019). "Kultur Pesantren dan Implementasi Akuntabilitas Modern." *Jurnal Antropologi Sosial*.
- Febriyanto, D. (2024). *Analisis Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Fitri, Riskal, and Syarifuddin Ondeng. "Pesantren Di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter." *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>.
- Hidayat, R., & Sari, D.P. (2021). "Studi Longitudinal Kualitas Pendidikan Pesantren dengan Sistem Akuntabilitas." *Jurnal Evaluasi Pendidikan*.
- Jayanti, P. D. (2024). *Implementasi Prinsip Good Governance di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar*. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Kuncaraningsih, H. S. (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada BAZNAS Kabupaten Sleman Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Mastuhu. (2019). "Akuntabilitas dalam Manajemen Pondok Pesantren: Perspektif Islam dan Modern." *Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2),
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

- Mujib, A. (2020). "Evaluasi Model Akuntabilitas Holistik di Pondok Pesantren." *Jurnal Manajemen Islam*, 8(2).
- Mutmainah. "Analisis Good Governance Terhadap A . Pendahuluan Memaksimalkan Nilai Perusahaan Adalah Tujuan Utama Dibentuknya Sebuah Perusahaan . Harga Yang Bersedia Dibayar Oleh Calon Investor Seandainya Suatu Perusahaan Akan Dijual Diartikan Sebagai Nilai." *Eksis X*, no. 2 (2015).
- Nasution, S A. "Pengaruh Good governance Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lazismu Di Kota Pekanbaru." : *Economics, Accounting and Business Journal* 1, no. 1 (2021). <https://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/view/282%0Ahttps://jom.umri.ac.id/index.php/ecountbis/article/download/282/17>.
- Nasution, H. (2020). "Analisis Kebutuhan SDM untuk Manajemen Pondok Pesantren Modern." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2).
- Nasution, Sangkot. "Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan." *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam VIII*, no. 2 (2019).
- Niarachma, Ranynda. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress: Studi Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2007-2010." *Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia*, 2012, 2010.
- Nur Ariani, S. F. (2022). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Tingkat Lokal*. Jurnal Administrasi Negara.
- Oktafia Renny, Abdul Basith. 2017. *Implementasi Good Coporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Data Saing*
- Presiden, Turan, Nomor Tahun, and Moh Ikfar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Kon- Traktor Dalam Kontrak Pemborongan Menurut Pera-" 12, no. 2 (2024).
- Purnamasari, Intan, and Emile Satia Darma. "Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Loyalitas Nasabah." *Akutansi Dan Infestasi* 16, no. 1 (2015).
- Qomar, M. (2019). "Akuntabilitas Pendidikan di Pondok Pesantren: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1).
- Rahman, F. (2020). "Evaluasi Sistem Administrasi Keuangan Pondok Pesantren." *Jurnal Audit dan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 9(2).
- Ramadani, L., & Putri, M. (2022). *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan pada Pondok Pesantren*. Jurnal Akutansi dan Audit Syariah.

- Sari, Indah Permata. "Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan." *Juripol* 4, no. 1 (2021): 90–97. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10987>.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D." Bandung: Alfabeta, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Vol.53. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukmaningrum, H., & Alamsyah, M. (2023). *Good Governance dalam Lembaga Pendidikan Islam: Kajian Stakeholder*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Suwarno, Hendrayuda. (2023). *Penerapan Prinsip Good governance di Pondok Pesantren*. *Jurnal Qualitative Research Of Business And Social Sciences*. <https://journal.upy.ac.id/index.php/qrobss>
- Syafe'i, I. (2019). "Model Implementasi Akuntabilitas Bertahap di Pondok Pesantren." *Jurnal Administrasi Pendidikan*.
- Wahid, A. (2020). "Ekspektasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pondok Pesantren." *Jurnal Sosiologi Agama*.
- Yuliana, I., & Firmansyah, H. (2021). *Implementasi Teori Agensi dalam Lembaga Pendidikan Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Yusuf Faisal, I. (2024). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kontrak dan Pelayanan Pasca Diberlakukannya Perpres No. 81 Tahun 2010 Pada PT. TASPEN Yogyakarta*. *Jurnal Hukum dan Administrasi*.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anis Khoirun Nisa
NIM : E20183137
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 Mei 2025
Saya yang menyatakan

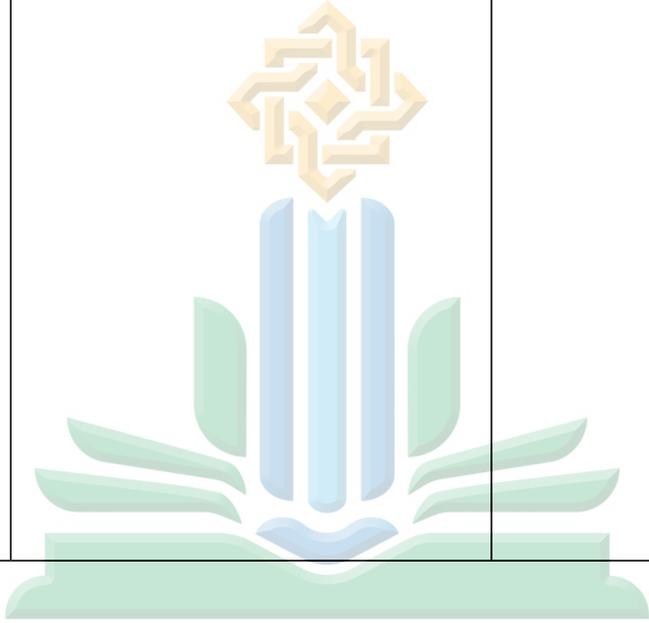


Anis Khoirun Nisa
NIM. E20183137

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an Di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	1. Prinsip good governance	1. Prinsip good governance : mengetahui tata kelolaan pondok pesantren	1. Sumber informan : a. ketua yayasan b. pengurus pondok c. santri d. wali santri 2. Dokumentasi	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Lokasi Penelitian Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an Jember 3. Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis Data : Deskriptif 5. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana implementasi prinsip transparansi pada lembaga pondok pesantren ilmu al qur'an? 2. Bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas pada lembaga pondok pesantren ilmu al qur'an? 3. Bagaimana implementasi prinsip tanggungjawab pada lembaga pondok pesantren ilmu al qur'an? 4. Bagaimana implementasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

					<p>prinsip kemandirian pada lembaga pondok pesantren ilmu al qur'an?</p> <p>5. Bagaimana implementasi prinsip kesetaraan pada lembaga pondok pesantren ilmu al qur'an?</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.19/05/2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 Mei 2025

Kepada Yth.
Pengasuh Pondok Ilmu Al Qur'an Pesantren Internasional
di Jl. Bandeng No.1 Kec. Kaliwates, Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Anis Khoirun Nisa
NIM : E20183137
Semester : XIV (Empat Belas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis prinsip *good governance* pada lembaga pendidikan di pondok pesantren wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dr. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si.



YAYASAN PONDOK ILMU AL QURAN PESANTREN INTERNASIONAL

Sekretariat : Jl. Bandeng No. 1 Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember
E-mail: yayasanpiq.pi@gmail.com Kode Pos: 68135 Telp: 081334544565

SURAT KETERANGAN PENELITIAN No. 003/SKP/YPI-PI/AL8342/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra Gunawan
Tempat, Tgl. Lahir : Jember, 19 Mei 1971
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Ilmu Al Qur'an Pesantren Internasional

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Anis Khoirun Nisa
NIM : XIV
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN ILMU AL QUR'AN DI KABUPATEN JEMBER"** sejak tanggal 19 Mei sampai dengan 27 Mei 2025 di Yayasan Pondok Ilmu Al-Qur'an Pesantren Internasional Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Mei 2025

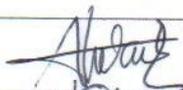
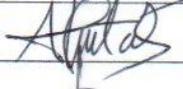
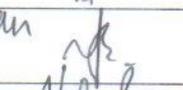
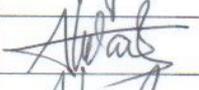
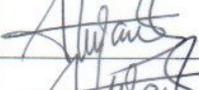
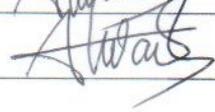
Ketua Yayasan Pondok Ilmu Al-Qur'an
Pesantren Internasional



H. INDRA GUNAWAN

JURNAL PENELITIAN

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA LEMBAGA PONDOK PESANTREN ILMU AL QUR'AN DI KABUPATEN JEMBER

Tanggal	Keterangan	Paraf
19 Mei 2025	Menyerahkan surat izin penelitian dan proposal penelitian	
20 Mei 2025	Menembusi surat izin dan penentuan informan	
21 Mei 2025	Wawancara dengan bapak Indra Gunawan selaku ketua yayasan pondok	
24 Mei 2025	Wawancara dengan bapak Agung selaku pengurus lembaga pondok	
24 Mei 2025	Wawancara dengan bapak Budi selaku pengurus pondok	an 
25 Mei 2025	Wawancara dengan Amel selaku santri pondok	
25 Mei 2025	Wawancara dengan ibu Sanipa selaku wali santri pondok	
26 Mei 2025	Meminta surat izin selesai penelitian	

Jember, 26 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
INTERNASIONAL



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana latar belakang pondok pesantren ilmu al qur'an ini?
2. Bagaimana bentuk kepengurusan, dan apa visi misi pondok pesantren ilmu al qur'an?
3. Bagaimana proses pengambilan keputusan penting di pesantren dilakukan dan apakah proses secara transparan?
4. Apakah ada mekanisme untuk mengakses informasi penting terkait pengelolaan pesantren?
5. Apakah ada saksi bagi pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan pesantren?
6. Apakah semua santri diperlakukan secara adil dan setara?
7. Apakah ada deskriminasi berdasarkan latar belakang atau status sosial?
8. Bagaimana pengelolaan pesantren memastikan keadilan dalam pemberian sanksi dan penghargaan?
9. Bagaimana pesantren membina budaya mandiri dikalangan santri, guru dan pengelola?



YAYASAN PONDOK ILMU AL QURAN PESANTREN INTERNASIONAL

Sekretariat : Jl. Bandeng No. 1 Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember
E-mail: yayasanpiq.pi@gmail.com Kode Pos: 68135- Telp: 081334544565

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pembina : BIBIT RAHAYU

Pengawas Yayasan : MOH. IDHAM DAVID

Ketua Yayasan : INDRA GUNAWAN

Sekretaris : IMAM FATONI

Bendahara : TEGUH BUDIANTO

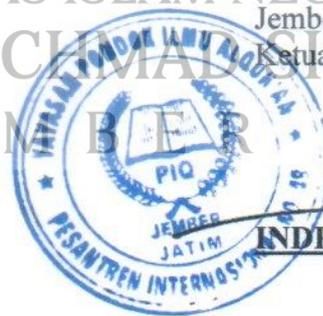
Bidang Divisi Kegiatan :

1. Bidang Pendidikan : ELVA MARIA
2. Bidang Humas, Komunikasi dan Pembangunan : FARIT PALUPI NINGTYAS
3. Bidang Logistik dan Perlengkapan : ANDRIK HERIYANTO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 21 Mei 2025

Ketua Yayasan



INDRA GUNAWAN

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu sanipa (wali santri)



Wawancara dengan Amel (santri)



Wawancara dengan pengurus pondok Bapak Agung



Wawancara dengan ketua yayasan Bapak Indra Gunawan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : ANIS Khoirun Nisa
NIM : E20183137
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ilmu Al Qur'an Di Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,

Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mariyah Ulfah, M.E.I

NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Anis Khoirun Nisa
NIM : E20183137
Semester : XIV (Empat Belas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 27 Mei 2025

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,


Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Anis Khoirun Nisa

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 Desember 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Lumba-lumba Lingk. Krajan, RT/RW 001/001.
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Agama : Islam

No Hp : 085726144943

Alamat E-mail : aniskhoirun147@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Al Hidayah Mangli - Jember
2. SMP/MTS : Darus Sholah Jember
3. SMA/MA : SMA Nuris Jember
4. Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember